

Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Politik Lingkungan Hidup: Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Dynamics Of the Role and Strategy NGOs in Enviromental Politics: Case of Forest and Land Fires

Hamzah Jamaludin*, Wijayanto & Supratiwi

Progam Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: 16 Juni 2022; Direview: 20 Juni 2022; Disetujui: 02 Agustus 2022

*Corresponding Email: Hamzahjams29@gmail.com

Abstrak

Organisasi non-pemerintah (LSM) dan perusahaan konservasi telah mempromosikan standar sukarela global, seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), untuk memproduksi barang-barang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di negara-negara tropis. Penelitian ini berusaha untuk memahami strategi dan efektivitas LSM konservasi terhadap RSPO. Penelitian kami mendokumentasikan bahwa LSM konservasi, ketika terlibat dengan RSPO, dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jenis sumber daya yang dimobilisasi dan tujuan konservasi: 1) 'LSM kolaboratif' berusaha mengubah sistem dari dalam dengan menyediakan penelitian ilmiah- berbasis informasi, dengan memegang posisi strategis dan dengan membuat aturan; 2) 'Lawan' tetap berada di luar RSPO saat menggunakannya sebagai platform untuk kampanye publik; 3) 'Sceptic' mendukung masyarakat untuk mengamankan hak-hak tanah lokal. LSM-LSM ini telah menerapkan strategi yang memperkuat institusi RSPO. Namun, pelembagaan RSPO mencegah LSM mencapai tujuan mereka karena tiga alasan: 1) LSM individu tidak dapat mengubah strategi; 2) LSM yang menggunakan strategi keterlibatan yang berbeda tidak dapat berkolaborasi; dan 3) LSM yang skeptis secara struktural dikeluarkan dari RSPO, meskipun hak atas tanah lokal merupakan masalah mendasar yang menjadi perhatian konservasi keanekaragaman hayati. LSM akan lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka baik dengan berfokus pada tujuan konservasi awal mereka atau dengan berkolaborasi secara strategis satu sama lain di luar struktur RSPO.

Kata Kunci: Dinamika Peran; Strategi LSM; Politik Lingkungan

Abstract

Protection non-administrative associations (NGOs) and firms have been advancing worldwide willful principles, for example, the Roundtable on Supportable Palm Oil (RSPO), to create naturally dependable merchandise in tropical nations. This examination tries to figure out the methodologies and the viability of preservation NGOs concerning the RSPO. Our examination records that the preservation NGOs, while drawing in with the RSPO, might be separated into four classifications in view of the sort of assets prepared and the protection objectives: 1) 'Cooperative NGOs' try to change the framework from inside by giving logical exploration based data, by standing firm on essential situations and by making rules; 2) 'Rival' stays outside the RSPO while involving it as a stage for public missions; 3) 'Doubter' upholds networks to get neighborhood land privileges. These NGOs have carried out techniques that fortified RSPO's foundation. Be that as it may, the organization of the RSPO keeps the NGOs from arriving at their objectives for three reasons: 1) individual NGOs can't change system; 2) NGOs utilizing different commitment procedures can't team up; and 3) the doubter NGOs are basically rejected from the RSPO, however nearby land freedoms are a principal matter of worry for biodiversity protection. NGOs would be more successful in arriving at their objectives either by focussing on their underlying preservation goals or by decisively teaming up with one another external the designs of the RSPO.

Keywords: Role Dynamics; NGO Strategy; Environmental Politics

How to Cite: Jamaludin, H., Wijayanto., & Supratiwi. (2022), Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Politik Lingkungan Hidup: Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1): 820-828



PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati hutan tropis menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan lebih dari 1% per tahun, sebagian besar karena pertanian ekspansi ke hutan (WWF et al. 2014). Asia Tenggara negara-negara khususnya Indonesia dan Malaysia, ikuti ini tren karena lonjakan baru-baru ini dari industri minyak sawit yang disubsidi oleh pemerintah masing-masing (Pye dan Bhattacharya, 2013; USDA, 2014). Setelah tanaman marjinal di tahun delapan puluhan, perkebunan kelapa sawit skala besar mengubah lanskap hutan dataran rendah di kedua negara. Di Indonesia saja, perkebunan mencakup 110 ribu km persegi, termasuk 60% untuk perkebunan skala besar masing-masing beberapa ribu hektar (DJEC, 2014). Tambahan 150 hingga 270 ribu km persegi berada di bawah izin untuk perkebunan kelapa sawit lebih lanjut (Colchester dan Chao, 2011). Kawasan hutan lahan gambut di kedua negara secara khusus terancam. Pada tahun 2010, perkebunan mencakup lebih dari 31.000 km persegi lahan gambut, dengan proyeksi antara 60.000 dan 90.000 sq. km pada tahun 2020 (Miettinen dkk., 2012).

Perkebunan kelapa sawit skala besar sangat mempengaruhi spesies liar. Perkebunan ini menampung 65% lebih sedikit keanekaragaman hayati daripada hutan alam. Mereka juga berkontribusi terhadap fragmentasi hutan dan menciptakan penghalang ekologis untuk spesies (Fitzhebert et al., 2008). Mamalia sangat rentan karena mereka membutuhkan wilayah yang luas beberapa kilometer persegi untuk populasi yang layak. Terutama karena ekspansi kelapa sawit baru-baru ini, orangutan, harimau, gajah dan badak di Asia Tenggara telah diklasifikasikan sebagai "terancam punah" atau "sangat terancam punah" di IUCN Red Daftar (IUCN, 2015). Misalnya, yang terancam punah Orangutan Sumatera Pongo abelli, dengan populasi saat ini 6.600 dan habitat sekitar 8.000 km persegi, diperkirakan telah hilang 90% dari habitat aslinya selama abad kedua puluh. Belum spesies ini masih kehilangan sekitar 50 km persegi habitat hutannya setiap tahun terutama karena perkebunan kelapa sawit (Ruysschaert, 2014). Meningkatnya produksi minyak sawit juga telah mengakibatkan 3.500 konflik lahan di perkebunan sawit dengan komunitas lokal di Indonesia antara tahun 1997 dan 2009 (Jiwan, 2013).

Dalam konteks inilah *World Wide Fund for Nature* (WWF) mempromosikan pembentukan multi pemangku kepentingan asosiasi swasta, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), yang bertujuan untuk menghasilkan secara sosial dan lingkungan kelapa sawit yang bertanggung jawab. Pada tahun 2001, WWF mendekati perusahaan-perusahaan Barat dengan sejarah beroperasi di Asia Tenggara, terutama yang berbasis di Inggris dan Belanda. Bank dan perusahaan agrobisnis di negara-negara ini berusaha untuk mengamankan pasokan jangka panjang mereka dan untuk melindungi diri dari kemungkinan kampanye lingkungan negatif. Memang, lembaga keuangan utama mereka (misalnya, *Rabobank*, *Standard Chartered*) mendanai perusahaan mengkonversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Perusahaan agrobisnis utama juga membeli dalam jumlah besar minyak sawit dari Asia Tenggara. Ini termasuk prosesor (AAK), produsen barang konsumen (*Unilever*) dan pengecer (*Mark and Spencer*, *Sainsbury's*). Sebagai seorang terkemuka misalnya, *Unilever* adalah pengguna tunggal minyak sawit terbesar.

Pada tahun 2004, RSPO didirikan sebagai sebuah asosiasi yang terdiri dari semua pemangku kepentingan swasta dalam pasokan minyak sawit rantai. Itu dibagi menjadi tujuh keanggotaan kategori: 1) petani kelapa sawit; 2) pengolah kelapa sawit; 3) produsen barang konsumsi; 4) lingkungan lembaga swadaya masyarakat (LSM); 5) LSM sosial; 6) bank/investor; dan 7) pengecer. Pada tahun 2007, para anggota menyepakati standar produksi, termasuk sosial dan prinsip dan kriteria lingkungan. Sebagai standar global pertama dalam pertanian di daerah tropis, itu telah direplikasi untuk komoditas lain seperti budidaya, bahan bakar pertanian, kapas, tebu, dan kedelai. Per Juni 2015, RSPO terdiri lebih dari 1.200 anggota biasa dan mensertifikasi 20% dari minyak sawit yang diproduksi secara global sebagai berkelanjutan.

Terlepas dari meningkatnya jumlah anggota dan volume RSPO diproduksi sesuai standar, kehilangan hutan alam dataran rendah masih meningkat di Indonesia, dengan 84.000 km persegi pada tahun 2012. Antara 2001-2012, Indonesia kehilangan rata-rata 56.000 km persegi hutan per tahun. Empat puluh persen dari kerugian ini disebabkan oleh skala besar perkebunan kelapa sawit



di lahan gambut. Keseluruhan RSPO belum efektif dalam membatasi deforestasi karena perkebunan kelapa sawit (McCarthy, 2012).

Pada saat yang sama, jumlah anggota LSM konservasi bergabung dengan RSPO terus meningkat, dengan total 30 anggota LSM konservasi pada akhir Juni 2015. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memahami pertumbuhan kontradiksi antara RSPO yang tampaknya tidak efektif dan berkesinambungan, dan bahkan meningkatkan minat LSM konservasi dalam skema ini. Dengan memahami peran dan efektivitas LSM konservasi sehubungan dengan standar RSPO, penelitian berusaha memahami inkonsistensi ini.

Artikel ini mengambil posisi mempertimbangkan keragaman LSM konservasi yang terlibat dengan RSPO. Ini merumuskan hipotesis bahwa LSM adalah pemain strategis dengan tujuan konservasi memobilisasi sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan ini (Friedberg, 1991). Berdasarkan apa sumber daya ini? dan tujuannya adalah, LSM mengadopsi sejumlah peran yang berbeda. LSM dapat memobilisasi empat jenis sumber daya yang luas untuk mempengaruhi hal hubungan untuk keuntungan mereka: 1) keahlian; 2) hubungan di luar sistem (misalnya, media, pemerintah); 3) komunikasi dan informasi; dan 4) aturan kelembagaan dalam sistem (Friedberg, 1991).

Pembangunan RSPO dapat membatasi kemampuan LSM untuk memiliki dampak dalam tiga cara yang saling melengkapi. Alasan awal akan bahwa pelembagaan memaksa setiap LSM individu untuk mengadopsi strategi tertentu karena sumber daya mereka berkurang sementara RSPO sedang melakukan penataan. Kemudian, pelembagaan dapat menghambat kolaborasi antara LSM dengan menggunakan strategi yang berbeda, padahal kolaborasi ini sebenarnya akan menjadi kunci untuk mendapatkan manfaat. Terakhir, beberapa LSM mungkin dikecualikan secara struktural karena ketidakcocokan mereka dengan kapitalistik yang lazim wacana dalam RSPO, meskipun partisipasi mereka fundamental, baik dalam hal keuntungan konservasi jangka panjang dan keadilan sosial (Cheyns, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa NGO sektor lingkungan hidup di Indonesia bisa berperan sebagai organisasi sosial yang bertujuan mempercepat terciptanya hubungan kuasa pada *multi actor* yang ada, hal ini dilakukan melalui cara memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dibuat, hukum, pasar juga sector swasta, serta memasyarakatkan ide-ide baru yang berbasiskan masyarakat pada ditingkat lokal, bertujuan menciptakan penguatan tata kelola sumberdaya alam yang baik di negeri ini. Misalnya dalam penelitian kausar, yang dimuat di *Indonesian Journal of Agricultural Economics* (IJAE), yang berjudul Konflik kepentingan dibalik konservasi studi di taman nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi, dipaparkan bahwa konflik kepentingan antara masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah di mana NGO di posisikan dalam posisi yang dicurigai sebagai perpanjangan tangan negara maju dalam membawa isu konservasi ke daerah yang berujung motif bisnis, namun keberadaan mereka juga dinilai sebagai bagian dari solusi, untuk kasus TNKS, pemahaman terhadap konsep *Community based management*, yang terlihat lebih dipahami oleh NGO menjadi sebuah resolusi konflik pada saat itu (Muzaki, 2021).

Penelitian selanjutnya juga menunjukkan bagaimana peran NGO lingkungan hidup dalam turut serta memberi tekanan terhadap pemerintah yang secara tidak langsung menunjukkan kekuatan politiknya sebagai salah satu elemen *civil society* yang ada di provinsi Jambi sering muncul di beberapa momen karhutla yang kerap terjadi di Provinsi ini, sebagai mana hasil penelitian yang memaparkan bagaimana peran dan strategi yang dilakukan NGO terhadap pemerintah kerap kali terbukti efektif memberikan tekanan yang kemudian memunculkan kebijakan public yang tepat sasaran. Dalam artikelnya yang berjudul *NGO's Roles and Strategies in the Environmental Politic Arena*, mereka menemukan bahwa strategi politik NGO lingkungan hidup dalam beberapa kasus Karhutla adalah mempengaruhi langsung sasaran perubahan, menggunakan jaringan advokasi transnasional, mempengaruhi aliran kapital, memanfaatkan dukungan elite pemerintahan, serta mempromosikan praktik-praktik terbaik pada tingkat lokal. Upaya tersebut memberikan pengaruh dalam bentuk lahirnya regulasi, memperkuat upaya penegakan hukum, mempengaruhi perilaku sektor swasta serta mendorong tumbuhnya praktik-

praktik lokal dalam pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat, dan ini dilakukan juga di Jambi (Rakhman, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pendekatan kolaboratif untuk melestarikan kawasan keanekaragaman hayati. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterbatasan pendekatan kolaboratif untuk melestarikan hutan primer. Tujuan lainnya yaitu untuk keterbatasan pendekatan kolaboratif untuk memobilisasi iklim argumen. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk strategi LSM yang skeptis dan keterbatasannya.

METODE PENELITIAN

Menganalisis peran dan efektivitas LSM konservasi di RSPO, penelitian ini mengambil pendekatan ekologi politik. Dengan kata lain, itu adalah gabungan dari pola interaksi dibuat untuk kepentingan ekonomi (ekspansi perkebunan kelapa sawit untuk agribisnis), perubahan ekologi (penghancuran orangutan habitat hutan hujan), dan pertempuran politik (penunjukan penggunaan lahan dan perampasan masyarakat lokal dari wilayah mereka) (Gautier, 2012). Dengan demikian, penelitian ini berakar tegas pada konflik akut pada alokasi penggunaan lahan antara LSM konservasi dan petani kelapa sawit karena orangutan konversi habitat menjadi perkebunan, di hutan dataran rendah Malaysia dan Indonesia. Konflik antara konservasionis ini dan petani berlangsung dengan latar belakang yang lebih luas masalah perampasan lahan hutan dari masyarakat lokal di negara-negara tersebut (Peluso, 2012). Pendekatan ini memiliki keuntungan dari membatasi ruang lingkup studi dan mempertahankan benang merah dari konteks global RSPO ke realitas ekologi nyata lokal dan konflik sosial di Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Tipologi keterlibatan LSM lingkungan dengan RSPO

Bentuk dari keterlibatan	Contoh LSM konservasi	Sumber daya yang dialokasikan untuk RSPO	Tujuan utama yang dicapai dengan RSPO
Collaborative	<i>Generalist on environment: Conservation International, World Resource Institute, WWF</i>	anggota RSPO Berpatisipasi aktif dalam RSPO. Dewan Eksekutif dan komisi yang berbeda Terlibat secara sistemik dalam RSPO	Reformasi sektor kelapa sawit dengan mempengaruhi RSPO dari dalam
Opposing	<i>Generalist on environment: Friends of the Earth, Greenpeace</i>	Bukan anggota RSPO Elaborasi file terhadap petani RSPO dipilih secara strategis Gunakan RSPO sebagai tribun untuk protes	Mengkritik secara radikal anggota RSPO, dan oleh karena itu RSPO dalam legitimasinya untuk melakukan reformasi sektor kelapa sawit dari dalam Berusaha untuk mendapatkan moratorium global pada deforestasi dan reformasi sektor kelapa sawit
Opportunistic	<i>Organisation focussing on orangutans: Borneo Orangutan Survival, Hutan, PanEco and Sumatran Orangutan Society</i>	Anggota RSPO: Berpatisipasi secara eksklusif dalam pertemuan tahunan dan majelis umum Gunakan RSPO sebagai tribun	Dapatkan keputusan spesifik untuk melindungi tertentu hutan untuk menyelamatkan habitat tertentu bagi orangutan (Tripa, Bukit Tigah Puluh, hutan rusak)



Sceptic	<i>Generalist on environment with human rights based approach: most of environment and social associations in the producing countries, Forest Peoples Programme, Sawit Watch</i>	Biasanya bukan anggota RSPO: Tidak ada sumber daya yang dialokasikan Tidak ada partisipasi Jika anggota RSPO, berpartisipasi dalam Dewan Gubernur dan komisi, tapi partisipasi menurun dari waktu ke waktu	Mencari pengakuan hak masyarakat, mempertanyakan model produksi Lembur, cenderung menghindari hubungan dengan RSPO karena ketidakmampuan mereka untuk mempengaruhi RSPO. RSPO cenderung menjadi sekunder dalam strategi mereka, tidak mempercayai inisiatif ini bahwa mengalihkan sumber daya yang lebih baik digunakan di tempat lain
---------	--	---	---

LSM dengan kantor pusat di Eropa (misalnya, *WWF, Zoological Society of London, Wetlands International*) atau Amerika Serikat (misalnya, *Conservation International, Institut Sumber Daya Dunia*). Mereka mematuhi RSPO secara keseluruhan visi untuk “mengubah pasar untuk membuat minyak sawit berkelanjutan norma”. Visi ini mirip dengan *WWF* Strategi Inisiatif Transformasi Pasar, yang menampilkan bagaimana LSM dapat mempengaruhi strategi komunikasi secara keseluruhan RSPO. LSM-LSM ini menginvestasikan banyak sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang bekerja dalam sistem RSPO untuk direformasi sektor kelapa sawit. Salah satu direktur program LSM internasional menyebutkan, “kami memiliki sejumlah orang bekerja penuh waktu di kelapa sawit di Singapura di bidang keuangan, di Indonesia dan Malaysia pada produsen, di Cina dan India, dan di seluruh Eropa dan di AS tentang bisnis konsumsi dan keterlibatan industri”.

Sumber daya ini disalurkan ke empat jalur utama: tindakan untuk mempengaruhi sistem RSPO dan mencapai konservasi sasaran. Pertama, mereka bertujuan untuk membuat aturan di RSPO yang mendukung tujuan konservasi mereka. Dalam praktiknya, ini berarti menempatkan meneruskan keputusan RSPO GA yang memaksa petani untuk menerapkan dokumen panduan RSPO untuk kepentingan konservasi. Meskipun LSM konservasi makeup kurang dari 3% (atau 30 anggota individu) dari semua RSPO anggota, RSPO GA mengadopsi sebagian besar keputusan mereka karena dengan dukungan dari sejumlah perusahaan hilir. Perusahaan hilir ini mendukung keputusan LSM tidak hanya karena mereka mengurangi risiko reputasi, tetapi juga karena mereka tidak menanggung biaya penerapan keputusan tersebut, yang didukung oleh petani saja.

Kedua, mereka mengambil posisi strategis di dalam RSPO. Mereka adalah bagian dari RSPO GB (*Conservation International, kemudian Dunia Resource Institute, dan WWF*) untuk mempengaruhi fungsi RSPO. Mereka juga berpartisipasi dalam kelompok kerja dan gugus tugas. Di kelompok kerja tersebut, mereka memegang posisi strategis sebagai ketua bersama: seperti *World Resource Institute for Biodiversity and Global, Pusat Lingkungan untuk kelompok kerja di gambut*. Lobi internal ini oleh LSM kolaboratif sering diabaikan, karena manuver politik ini terjadi jauh dari fokus perhatian publik. Seperti yang dijelaskan oleh mantan anggota BG, “*WWF* berada di dalam organisasi sangat penting, seperti yang saya rasakan, ketika saya menjadi anggota dewan. Mereka sama sekali tidak mengkritik perusahaan, tetapi sangat kritis di dalam organisasi, mendorong kriteria.”

Ketiga, mereka banyak menggunakan fakta-fakta ilmiah. Sebagai kolaboratif LSM konservasi terdiri dari ilmuwan, mereka menghargai argumen berbasis sains dalam RSPO. Sebagai contoh, *Zoological Society of London (ZSL)* menyatakan bahwa itu penting “untuk memastikan bahwa kebijakan yang muncul dan pedoman praktik yang baik bertujuan untuk mempromosikan produksi yang berkelanjutan didasarkan pada sains terbaik” (Persey, 2011).

Keempat, mereka secara luas berkampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menciptakan tekanan eksternal agar anggota RSPO dapat memenuhi komitmen mereka. Untuk menghindari taktik nama dan rasa malu, LSM ini menggunakan teknik kolaboratif yang terdiri

dari *benchmarking* anggota RSPO yang berbeda, membandingkan komitmen, dan mendorong mereka untuk mendapatkan sertifikasi. Seperti yang dikembangkan di bawah ini, mobilisasi keempat sumber daya ini teknik yang efektif dalam menantang norma RSPO, tetapi juga menyebabkan beberapa kendala struktural.

Keterbatasan Pendekatan Kolaboratif untuk Melestarikan Kawasan Keanekaragaman Hayati

RSPO telah mengembangkan konsep NKT untuk melestarikan daerah yang paling penting bagi keanekaragaman hayati atau kesejahteraan manusia. Definisi dan penerapannya menjadi bahan diskusi yang intens antara petani dan konservasionis yang berlawanan pendapat tentang penggunaan lahan. Untuk petani, kawasan konservasi dipandang sebagai ruang laba yang tidak dimanfaatkan. Mereka berusaha membatasi ukuran kawasan lindung yang diperlukan dalam konsesi mereka. Di sebaliknya, LSM menganggap daerah dataran rendah sebagai daerah tropis yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati luar biasa. Menurut interpretasi ini, perluasan perkebunan kelapa sawit harus dilakukan di lahan yang sudah terdegradasi daerah karena "ada cukup lahan non-hutan yang cocok untuk pengembangan perkebunan memungkinkan untuk peningkatan produksi yang besar" (Ruysschaert, 2011). Konservasionis cenderung memaksimalkan yang ditunjuk kawasan konservasi jauh di luar hutan primer termasuk lahan terdegradasi.

Untuk mengimplementasikan konsep NKT, dengan kata lain mendefinisikan kriteria dan indikator yang menyertainya, Keaneekaragaman Hayati RSPO dan Komite Teknis (BTC) dibentuk pada tahun 2009. Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa komite ini memiliki signifikansi kesenjangan ilmiah pada biologi tropis. Perwakilan dari panitia ini merangkum situasinya, "kadang-kadang, tidak jelas" sama sekali. Terus terang, mengapa keanekaragaman hayati itu penting? Ini sama sekali tidak jelas untuk didemonstrasikan. Banyak ilmu yang dibutuhkan". Memang, penelitian tetap tidak meyakinkan tentang keanekaragaman hayati tropis konservasi. Hasil tergantung pada spesies dan tingkat organisasi (misalnya, genetik, spesies, atau ekosistem) dipelajari. Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya hutan yang terfragmentasi, yang lain dari hutan yang lestari (Struebig, 2011).

Keterbatasan Pendekatan Kolaboratif untuk Melestarikan Hutan Primer

Dengan kesenjangan pengetahuan struktural tentang keanekaragaman hayati yang menghambat LSM konservasi untuk memobilisasi informasi ilmiah yang efektif, LSM mengalihkan perhatian mereka ke implementasi kriteria 7.3. Kriteria ini meminta mempertahankan yang utama hutan atau NKT di dalam perkebunan setelah November 2005. Kriteria tersebut mengurangi ruang interpretasi petani, karena memberikan tanggal akhir yang jelas dan jenis hutan mana yang harus dikonservasi. Namun, hutan primer sulit untuk didefinisikan dalam praktiknya. Selain itu, tahun 2005 tunduk pada interpretasi. Memang, kriteria tersebut disepakati di RSPO GA 2007 sebagai bagian dari kesepakatan keseluruhan tentang dokumen panduan untuk anggota yang ingin mensertifikasi perkebunan. Penanam mempertimbangkan tanggal ini relevan hanya ketika sertifikasi diramalkan. Mereka berpendapat bahwa anggota pendiri RSPO tidak diminta untuk mengikuti persyaratan ini di awal. Mereka juga menambahkan bahwa beberapa penanam RSPO bisa saja mengambil alih non-RSPO lainnya petani yang mungkin memiliki hutan primer yang ditebang habis. Sebagai salah satu penumbuh menjelaskan, "Kami telah memahami bahwa aturan 2005 ini berlaku untuk perkebunan yang ada, ketika kami memulai sesuatu, kami bertanggung jawab sejak kami mengelola perkebunan, tidak sebelumnya." Untuk memperjelas poin-poin ini, keputusan RSPO GA mendukung proposal WWF tentang 'Prosedur Penanaman Baru' di 2008, bersama-sama diajukan dengan New Britain Palm Oil, salah satu dari penanam kelapa sawit terbesar di dunia. Keputusan meminta petani untuk melestarikan hutan primer terlepas dari apakah itu mencari sertifikasi atau tidak. Ini mulai berlaku pada Januari 2010, meskipun petani berusaha untuk menundanya dengan alasan kelayakan praktis di GA 2009.



Untuk memperhitungkan kewajiban petani, BG RSP0 menetapkan membentuk Gugus Tugas Kompensasi pada tahun 2010 sebagai sub-unit BHCV WG untuk periode awal satu tahun, dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada BG. Empat tahun kemudian, pada Mei 2014, Gugus Tugas memberikan dokumen panduan “sukarela”. Dokumen ini mencari “perbaikan berkelanjutan” situasi khusus masing-masing petani, menolak untuk mengusir atau menanggukkan mereka. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, LSM mengajukan argumen berdasarkan bukti ilmiah. Mereka memanfaatkan teknologi satelit sebagai metode pengukuran hutan primer atau hutan HCV yang rusak. Namun, LSM masih belum bisa memaksakan temuannya karena dua alasan utama. Keputusan berbasis sains masih tetap ada bermasalah.

Keterbatasan Pendekatan Kolaboratif untuk Memobilisasi Iklim Argumen

Mengalami kesulitan memobilisasi argumen ilmiah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan hutan primer, LSM telah berusaha untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan memajukan agenda perubahan iklim. Mereka mampu melakukannya karena pelepasan besar-besaran gas rumah kaca dari pohon dan gambut saat membangun perkebunan kelapa sawit di dalam hutan tropis. Penghancuran hutan ini untuk membangun perkebunan kelapa sawit melepaskan sejumlah besar rumah kaca gas. Penelitian pertama tentang emisi gas rumah kaca dari gambut di Indonesia mengungkapkan angka yang mencolok: Indonesia adalah yang ketiga penghasil emisi gas rumah kaca secara global, di belakang China dan Amerika Serikat (Hooijer, 2006). Seorang anggota RSP0 menjelaskan bahwa agenda iklim adalah argumen yang kuat untuk menyelamatkan lahan gambut area dari kehancuran, “Ketika Anda mendengar tentang rumah kaca studi emisi gas oleh Deltares, ini adalah studi teladan, dalam pandangan saya. Ini membuktikan oleh A ke B bahwa kita benar-benar tidak dapat melakukannya apa pun di lahan gambut.”

Jumlah besar ini berasal dari dua sumber: pohon dan gambut. Mengenai pohon, konversi tropis hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit melepaskan karbon dioksida karena hutan tropis menyimpan di atas tanah sekitar 190.000 kg karbon per hektar, sedangkan perkebunan kelapa sawit hanya menyimpan sekitar 40.000 kg per hektar; ini berarti bahwa perbedaan, atau sekitar 150.000 kg karbon per hektar, dilepaskan sebagai gas rumah kaca ketika hutan tropis alami dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Yang lebih penting adalah karbon dioksida yang dilepaskan dari gambut. Ini berasal dari gambut api untuk menyiapkan lahan dan oksidasi dari gambut kering dihasilkan dari pembuatan saluran drainase yang diperlukan untuk perkebunan (Agus, 2013).

Pada RSP0 GA 2008, *Wetlands International* mengajukan keputusan 'Moratorium Minyak Sawit Dari Tropis' Lahan Gambut yang meminta “penghentian lebih lanjut” pengembangan kelapa sawit di lahan gambut tropis”. BG RSP0 menolak pengajuan ini dengan alasan itu telah dimodifikasi pada menit terakhir setelah jatuh tempo tanggal pengajuan. Itu juga mencegah penyerahan keputusan awal yang menyebutkan, “RSP0 mengadopsi minyak sawit yang diproduksi di lahan gambut untuk selanjutnya dipertimbangkan tidak berkelanjutan sampai terbukti sebaliknya”. Menggunakan aturan prosedural, RSP0 BG telah menemukan cara untuk menghindari bentrokan antara petani dan LSM konservasi.

Strategi LSM yang Skeptis dan Keterbatasannya

LSM yang skeptis mencari pengakuan hak masyarakat atas tanah dan karenanya melestarikan keanekaragaman hayati dan hutan. Memang, masyarakat lokal telah mengelola secara berkelanjutan kekayaan keanekaragaman hayati tersebut, kawasan hutan yang kini terancam oleh perkebunan kelapa sawit. Skeptis ini sebagian besar beroperasi di negara produsen dengan sosial dan lingkungan agenda jangka panjang (misalnya, Masyarakat Konservasi Dunia, the Yayasan Internasional Leuser, Sawit Watch, Paus, Hutan Program Rakyat). Kebanyakan dari mereka bukan anggota RSP0, harapan untuk Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, adalah jaringan dari 40 LSM sosial dan lingkungan Indonesia (Jiwan, 2013).



Sebagai anggota RSPO LSM skeptis utama, Sawit Watch menggunakan tiga jalan utama di RSPO untuk mencapai tujuannya. Pertama, mengajukan keputusan GA seperti 'Perlunya gugus tugas di petani kecil di GA2, menandatangani bersama mereka dengan internasional LSM, produsen, dan perusahaan hilir. Kedua, diadakan posisi strategis perwakilan LSM sosial di Dewan Eksekutif untuk mempengaruhi pelaksanaan keputusan ini. Ketiga, mempertahankan hubungan strategis di tingkat akar rumput memfasilitasi partisipasi penduduk setempat dalam RSPO. Partisipasi lokal mengambil tiga bentuk: 1) mereka membawa kasus pelanggaran standar RSPO terhadap petani hingga panel pengaduan; 2) mereka mengungkapkan pandangan mereka di RSPO pertemuan tahunan; dan 3) mereka mengorganisir protes massal selama pertemuan RSPO tahunan untuk standar RSPO yang lemah untuk masalah sosial (Parker, 2013).

Terlepas dari pencapaian anekdot untuk mendapatkan minoritas suara terdengar selama pertemuan meja bundar, strategi ini berhasil tidak mencapai tujuannya. Wacana manajemen yang lazim dalam proses RSPO mendiskreditkan hak atas tanah ini argumentasi (Cheyns, 2014). Institusionalisasi RSPO memperkuat masalah struktural ini dari waktu ke waktu dengan memperluas kesenjangan diskursif. Dengan mengadopsi wacana ini, kolaboratif dan LSM lawan juga meminggirkan LSM yang skeptis dan agenda konservasi dalam sistem RSPO.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Sawit Watch berangsur-angsur hilang, tertarik pada skema RSPO. Sebagai konsekuensi utama, ia pergi RSPO BG pada tahun 2012. Hanya *Forest Peoples Programme* yang berdiri kokoh aktif, dengan fokus pada Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan Indikator terkait (FPIC) dari dokumen panduan (Cholchester & Chao, 2014). Jika diterapkan, LSM yang skeptis percaya bahwa FPIC bisa menjadi alat yang ampuh untuk mendapatkan penduduk setempat hak mereka atas tanah yang diakui di areal kelapa sawit.

Kesimpulannya, skeptis cenderung menghindari hubungan dengan RSPO, karena ketidakmampuan mereka untuk mempengaruhi RSPO untuk benar-benar memasukkan masalah hak atas tanah. RSPO cenderung menjadi yang kedua dalam strategi keseluruhan. Para skeptis tidak mempercayai inisiatif yang mengalihkan sumber daya mereka yang terbatas. Bekerja erat di lapangan, skeptis tidak percaya RSPO dapat menangani akar sosiopolitik-ekonomi yang menggarisbawahi dari perusakan hutan, seperti kurangnya pengakuan hak atas tanah lokal, ekonomi jangka pendek yang tinggi kembali, kurangnya penegakan hukum dan promosi model pertanian skala besar. Mereka tetap sangat skeptis dalam hubungan dengan konversi mendadak ke agenda keberlanjutan oleh semua produsen besar ini. Perwakilan dari salah satu LSM merangkum perasaan umum: "Saya telah memberi tahu Anda sejak awal mula. Buang-buang waktu [RSPO]. Ini otak murni pencucian. Saya belum pernah melihat orang-orang kelapa sawit ini diambil ke pengadilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan pentingnya mengambil pandangan politik pendekatan ekologi dan mempertimbangkan keragaman LSM keterlibatan dengan RSPO. Sebagai pemain strategis dengan jelas tujuannya adalah memobilisasi sumber daya mereka yang terbatas, konservasi LSM menggunakan empat strategi (atau peran) yang berbeda untuk membuat keuntungan konservasi: 1) Pendekatan kolaboratif berusaha untuk berubah sistem dari dalam dengan menyediakan penelitian ilmiah berbasis informasi, memegang posisi strategis dan menciptakan aturan; 2) LSM lawan tetap berada di luar RSPO sementara menggunakannya sebagai platform untuk kampanye publik; 3) Akhirnya, mereka yang mengadopsi peran '*Sceptic*' mengambil pendekatan berbasis hak untuk konservasi dengan bekerja sama dengan masyarakat lokal masyarakat untuk menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Dalam strategi ini, LSM konservasi memainkan peran penting dalam memperkuat konservasi keanekaragaman hayati di RSPO. Ini termasuk adopsi banyak keputusan GA, pembuatan sistem pengaduan yang komprehensif, BHCV WG, Satuan Tugas Kompensasi dan Kelompok Kerja di Gas-gas rumah kaca. Semua aturan dan institusi ini membantu untuk memperkuat standar RSPO dan ketentuan-ketentuannya penerapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., I.E. Henson, B.H. Sahardjo, N. Harris, M. van Noordwijk, dan T.J. (2013). Tinjauan faktor emisi untuk penilaian emisi CO₂ dari perubahan penggunaan lahan menjadi kelapa sawit di Asia Tenggara. Dalam: Laporan dari Panel Teknis Kelompok Kerja GRK RSPO Kedua (eds. Killeen, T.J., dan J. Goon). hal. 7-31. Kuala Lumpur: RSPO.
- Barker, M. (2009). Ketika Lingkungan Melegitimasi Penjarahan. Komentor Angsa 15, <http://www.swans.com/library/art15/barker12.html>. Diakses pada Juni 2022.
- Cheyns, E. (2012). (Dé) politisation des standards dans les dispositifs de normalisation multiparties prenantes. Les cas du soja et de l'huile de palme. In: Normaliser au nom du développement durable (eds. Alphandréry, P., M. Djama, and A. Fortier). Pp.101-118. Versailles: Quae
- Cheyns, E. (2014). Making "minority voices" head in transnational round tables: the role of NGOs in reintroducing justice and attachments. *Agriculture and Human Values* 31(3): 439-453
- Cholchester, M. and S. Chao. (2014). Revising the RSPO guide on free, prior and informed consent. Conclusions and questions. RT12. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme.
- Friedberg, E. (1991). *Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l'action organisée*. Paris: Seuil
- Gautier, D. and T. Benjaminsen. (2012). Introduction à la political ecology. In: *Environnement, discours et pouvoir. L'approche Political Ecology*. (eds. Gautier, D. and T. Benjaminsen). Pp. 5-20. Versailles: Quae
- Hooijer, A., M. Silvius, H. Wösten, and S. Page. (2006). PEAT-CO₂: assessment of CO₂ emissions from drained peatlands in SE Asia. Delft, the Netherlands: Delft Hydraulics. <http://www.stockandland.com.au/news/agriculture/agribusiness/general-news/adm-ups-wilmar-stake/2719170.aspx> 09. Diakses pada tanggal 9 Juni 2022
- Jiwan, N. (2013). The political ecology of the Indonesia palm oil industry, a critical analysis. Pp. 48-75. In: *The palm oil controversy in South East Asia. A transnational perspective*. (eds. Pye, O. and J. Bhattacharya). Pp. 48-75. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- McCarthy, J. (2012). Certifying in contested spaces: private regulation in Indonesian forestry and palm oil. *Third World Quarterly* 33(10): 1871-1888
- Miettinen, J., A. Hooijer, S. Chenghua, D. Tollenaar, R. Vernimmen, S. Chin Liew, C. Mallins, and S. Page. (2012). Extent of industrial plantations on Southeast Asian peatlands in 2010 with analysis of historical expansion and future projections. *GCB Bioenergy* doi: 10.1111/j.1757-1707.2012.01172.x
- Muzaki, A. (2021). Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 23(1)
- Parker, D. (2013). Palm oil workers stage massive protest at sustainability meeting in Indonesia. November 19. Mongabay. <http://news.mongabay.com/2013/1119-dparker-palm-oil-worker-protest.html>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2022
- Peluso, N. (2012). Situer les political écologies: l'exemple du caoutchouc. In: *Environnement, discours et pouvoir. L'approche Political Ecology*. (eds. Gautier, D. and T. Benjaminsen). Pp. 37-65. Versailles: Quae
- Persey, S., R. Nussbaum, M. Hatchwell, S. Christie, and H. Crowley. (2011). *Towards sustainable palm oil: a framework for action*. Cambridge: ZSL/Proforest/WCS
- Rakhman, A. (2020). Dinamika Peran Ngo Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4).
- Ruysschaert, D. and D. Salles. (2014). Towards global voluntary standards: Questioning the effectiveness in attaining conservation goals. The case of the roundtable on sustainable palm oil (RSPO). *Ecological Economics* 107: 438-446
- Ruysschaert, D., A. Darsoyo, R. Zen, G. Gea, and I. Singleton. (2011). *Developing palm-oil production on degraded land*. Medan: PanEco, YEL and World Agroforestry Centre
- Struebig, M., T. Kingston, E. Petit, S. Le Comber, A. Zubaid, A. Mohd-Adnan, and S. Rossiter. (2011). Parallel declines in species and genetic diversity in tropical forest fragments. *Ecology Letters* 14(6): 582-590